







# Dekade

Refleksi 20 tahun perjalanan Yayasan Penabulu

# **DEKADE**

Refleksi 20 tahun Yayasan Penabulu

**Tim Penyusun**

Yayasan Penabulu

**Tata Letak dan Ilustrasi**

Yayasan Penabulu

**Tahun**

2023

# Daftar Isi

Refleksi 20 tahun Penabulu **[1]**

Yayasan Penabulu **[3]**

Wilayah Kerja **[4]**

Teori Perubahan **[6]**

Pendekatan Program **[8]**

Dampak **[9]**

Sumber Daya **[20]**

Sumber Daya sesuai Area Tematik **[21]**

2021 **[22]**

2022 **[24]**

Petikan Cerita dari Tapak **[27]**

Badan Pelaksana **[40]**



**Eko Komara**  
Direktur Eksekutif  
Yayasan Penabulu

# Refleksi 20th Perabulu

Tanpa terasa sudah 2 dekade kami menjadi bagian kelindan pilar-pilar pembangunan di Indonesia. Meski masih jauh dari cukup, namun rasanya kami harus tetap mengapresiasi berbagai macam upaya yang telah kami lakukan di 20 tahun terakhir ini, beragam kerja keras kami, untuk mewujudkan **Masyarakat Indonesia yang Berdaya**.

Meski demikian, perubahan dan dinamika global, ditambah dampak dari pandemi Covid-19 lalu, benar-benar memunculkan tantangan tersendiri, bagi kami, bagi kita, pilar penyeimbang pembangunan di negeri ini.

Krisis sumber daya bagi Organisasi Masyarakat Sipil menjadi kian nyata. Keterputusan hubungan benar terjadi, bahkan dengan ruang-ruang dimana kita tinggal, ruang terdekat hidup kita. Hal ini lalu membawa pada satu pertanyaan yang mendasar, benarkah kita benar-benar menjadi bagian dari publik yang kita suarakan?!

Pertanyaan ini kemudian membawa kami dalam pemaknaan yang mendalam tentang; keterhubungan, bertumbuh, dan berevolusi bersama, dalam satu tujuan yang sama; keberlanjutan.

Kita semua menyadari, menjaga keberlanjutan organisasi sama halnya dengan perjuangan untuk menjaga relevansi, posisi dan peran

Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia. Maka dengan demikian, untuk memastikannya Organisasi Masyarakat Sipil harus kembali ke lokalitasnya, menempatkan diri sebagai bagian dari analisa masalah dan pencarian solusi di wilayah masing-masing, tidak hanya sekedar bekerja di bawah isu-isu donor. Organisasi masyarakat sipil harus mulai memikirkan cara menggalang sumber daya domestik dan tidak terus-menerus menggantungkan diri terhadap dukungan dari donor.

Dan sebagai *Civil Society Resources Organisation* kami senantiasa akan berupaya untuk mendorong lahirnya beragam rancangan solusi yang akan mengubah situasi baik di tingkat lokal maupun nasional melalui upaya mobilisasi sumber daya secara kolektif.

Akhir kata, mari saling terhubung, mari bergerak, dan mari berjuang bersama.



*Rumah Besar - Kampung Adat  
Sumba Barat Daya  
Doc. Program: Rado Puji Santoso*

# Yayasan Penabulu

Yayasan Penabulu, didirikan di Jakarta pada tahun 2002, berdasarkan akte notaris No. 1, tanggal 22 Oktober 2003, yang dibuat oleh Rita Riana Hutapea, SH, notaris publik di Jakarta, yang telah dikukuhkan dengan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-435 HT.01.02.TH 2004, tanggal 5 Agustus 2004.

Sebagai organisasi sumber daya masyarakat sipil, Penabulu memiliki visi memberdayakan masyarakat sipil Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yang diyakini akan diwujudkan dengan memperkuat posisi dan peran organisasi masyarakat sipil di Indonesia melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi; mobilisasi, pengelolaan dan distribusi sumber daya; pengembangan kemitraan yang setara antar sektor pembangunan lainnya; serta promosi partisipasi publik dan keterlibatan masyarakat seluas mungkin.

Penabulu memiliki empat lembaga pelaksana yaitu; (1) Pengelolaan Hibah Penabulu, (2) Jejaring Pelaksana Penabulu, (3) Lembaga Penelitian Penabulu, dan (4) Tanggap Bencana Penabulu. Kami bekerja di hampir seluruh wilayah Indonesia melalui 28 kantor cabang kami dari Aceh hingga Papua, dengan sembilan isu strategis; (1) Pembangunan Inklusif, (2) Pasar Berkelanjutan, (3) Kemitraan Publik-Swasta-Masyarakat, (4) Lingkungan dan

Perubahan Iklim, (5) Pembangunan Pedesaan, (6) Kesehatan Masyarakat, (7) Akuntabilitas Publik, (8) Penguatan Ruang Kewarganegaraan, dan (9) Keadilan Transformasi Digital sebagai kerangka kerja kami.

Fakta menegaskan bahwa sampai saat ini tidak mungkin semua rencana pembangunan yang tercantum dilakukan secara sepihak oleh pemerintah; pengembangan model yang melibatkan pemangku kepentingan lainnya dari tahap pengembangan, perancangan dan pengelolaan mutlak diperlukan. Dalam setiap tingkat implementasi program dan kegiatannya, Penabulu mengedepankan pendekatan public-private-people partnership, dimana Penabulu akan selalu berperan sebagai fasilitator peningkatan komitmen dan kapasitas pemerintah pusat dan daerah; peningkatan tata kelola dan manajemen perusahaan; dan sekaligus menjadi daya ungkit bagi peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek pembangunan.

Semua itu diharapkan dapat menjamin peningkatan partisipasi dan rasa memiliki para pihak terhadap seluruh prakarsa pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat setinggi-tingginya, guna mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan tidak ada yang ditinggalkan.

# Wilayah Kerja

2009 - 2022



Sumber data:  
Database Penabulu 2009-2022

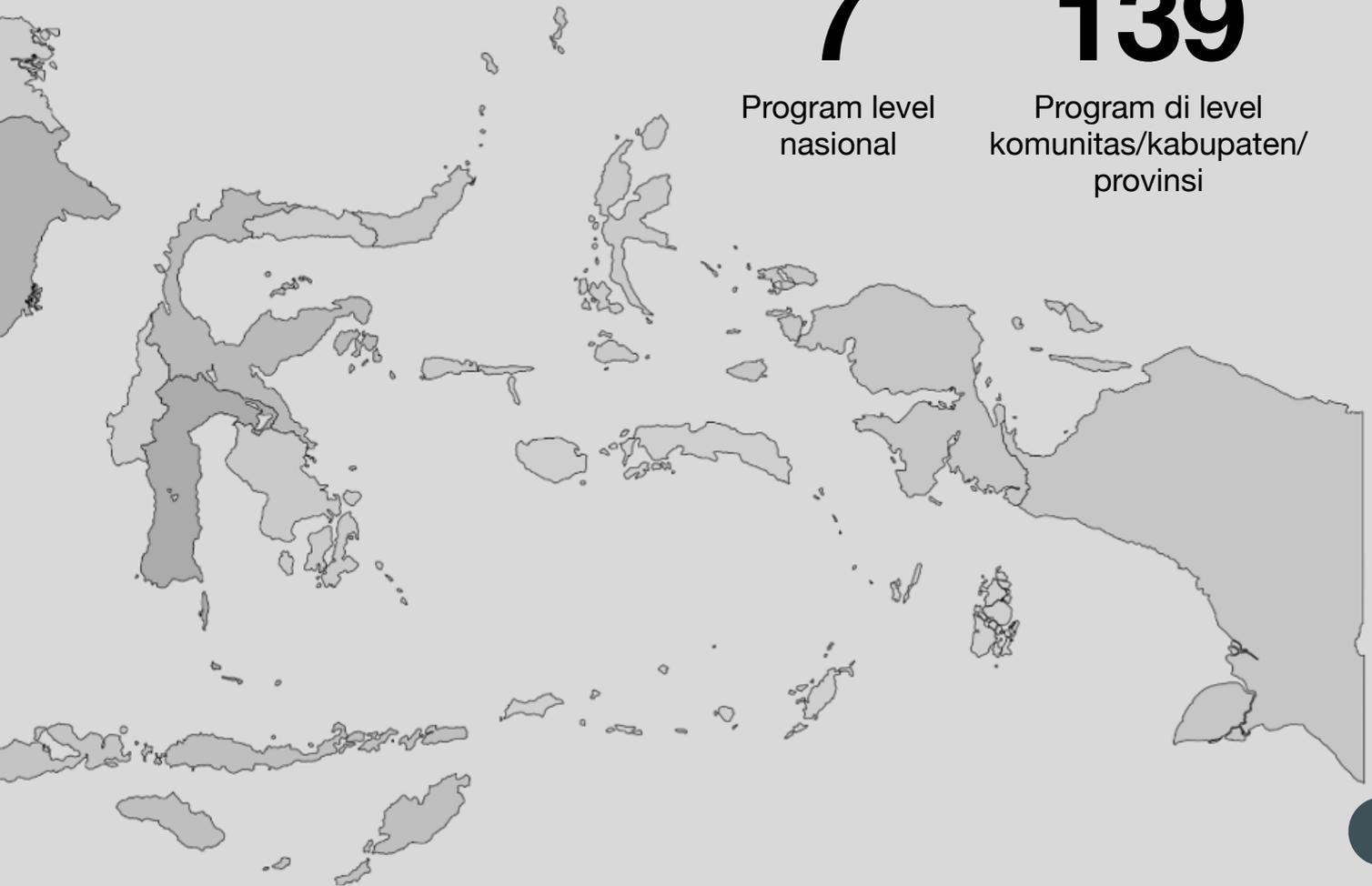
**34** Provinsi

**147** Program

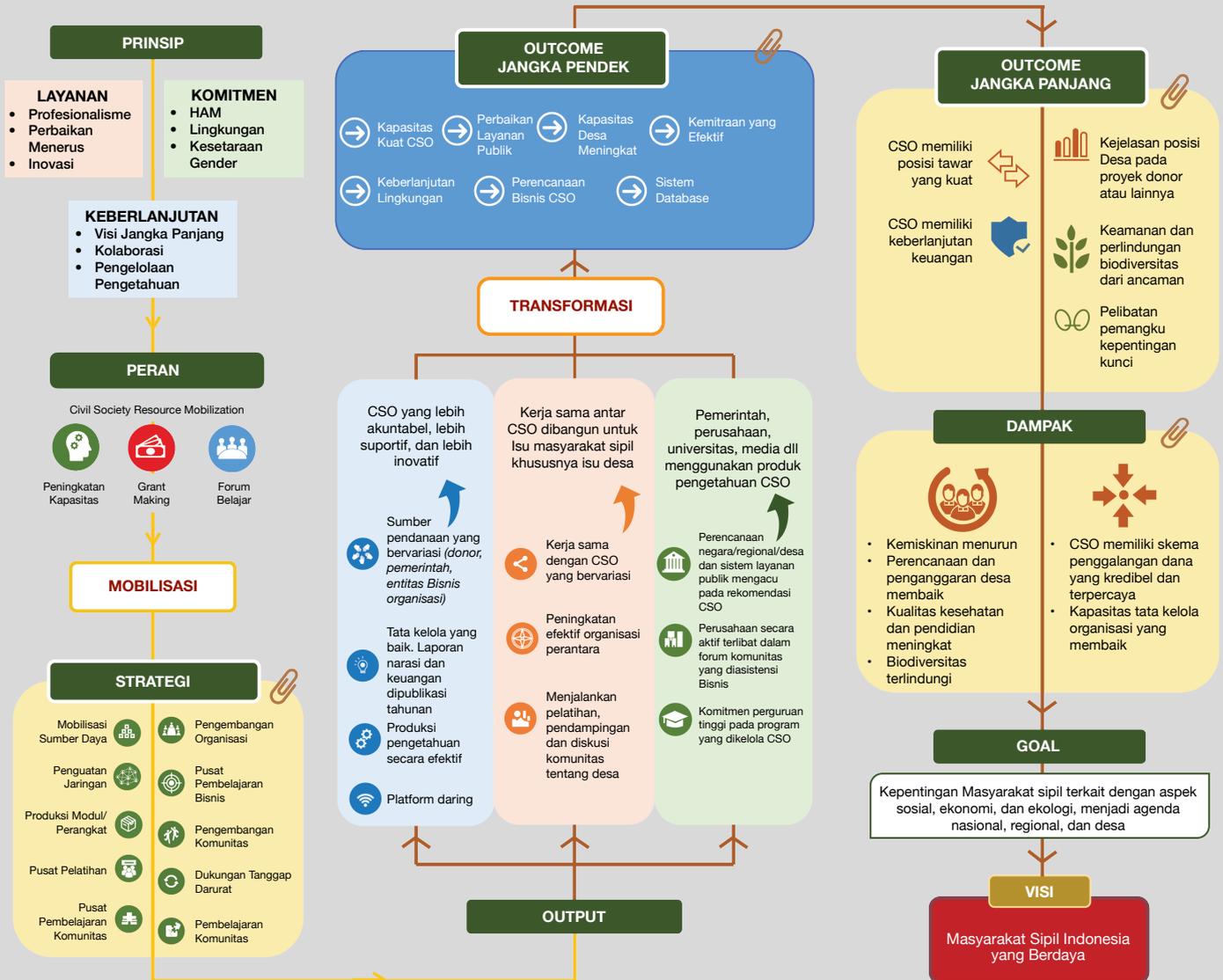
**7**      **139**

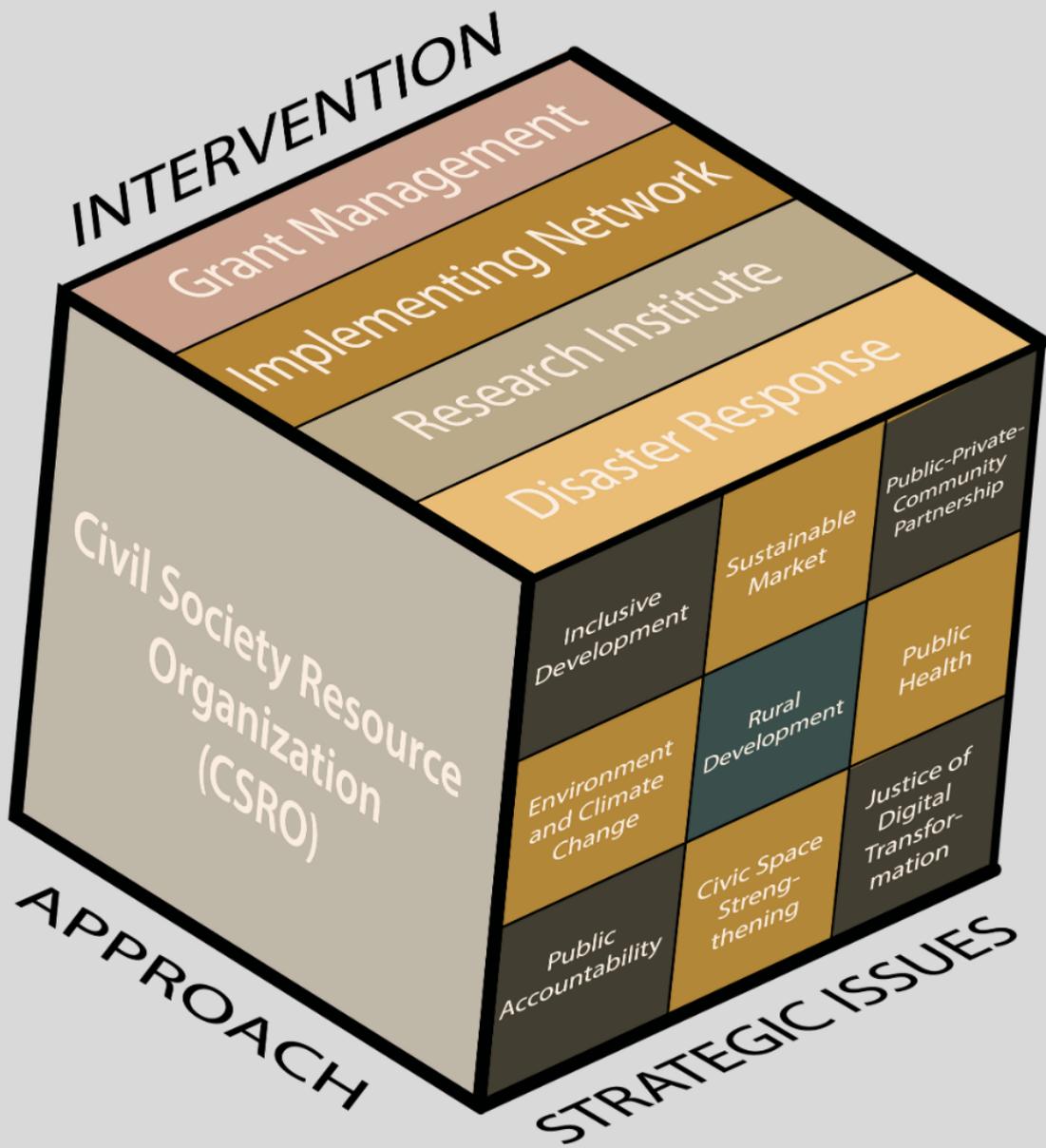
Program level  
nasional

Program di level  
komunitas/kabupaten/  
provinsi



# Teori Perubahan





# Pendekatan Program



Bekerja bersama  
**> 450.174**  
orang

Bekerja bersama  
**> 16**  
Kementerian/Lembaga  
Pemerintah

Bekerja bersama  
**> 847**  
Organisasi Masyarakat  
Sipil

Bekerja bersama  
**> 90**  
Perusahaan Nasional/  
Lokal & Asosiasi

Bekerja bersama  
**> 69**  
Organisasi Komunitas

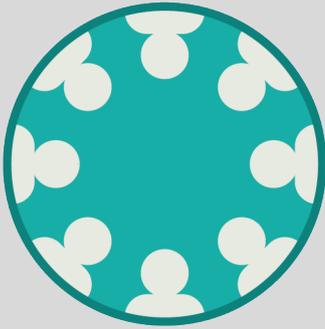
# Dampak

9

Isu  
Strategis

147

Program



# Pembangunan Inklusif



Gagasan pembangunan inklusif akan mengurangi kemiskinan melalui kontribusi antara publik/pemerintah, masyarakat sipil, serta sektor swasta.



Memperkuat proses pengambilan keputusan dalam pembangunan partisipatif dengan menghormati nilai dan prinsip hak asasi manusia; serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas



# Program

**3**



Tahun

**2016  
2022**



Donor

**2**



Total Dana\*

**64,906**

*\*dalam USD*



# Pasar Berkelanjutan



Intervensi yang komprehensif dalam rantai nilai pasar yang lebih menguntungkan dan berpihak pada masyarakat miskin (petani kecil) dengan meningkatkan kapasitas untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan



Menentukan kreasi dan inovasi terbaik serta mencari solusi untuk setiap komoditas sesuai dengan karakteristik dan ruang lingkungannya di wilayah tersebut. Penabulu memberikan bantuan langsung, mengembangkan rencana bisnis, serta berbagai model intervensi berbasis bukti, mis. melalui pengkajian dan penelitian sederhana



# Program

**18**



Tahun

**2014 -  
2019**



Donor

**8**



Total Dana\*

**1,169,778**

*\*dalam USD*



# Kemitraan Pemerintah-Swasta- Komunitas



Pendekatan kemitraan publik-swasta dan masyarakat merupakan model sinergis untuk mencapai model pembangunan berkelanjutan untuk menyediakan layanan yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat



Mendorong dialog lintas pihak melalui penelitian, seminar/ lokakarya dan penerapan model kerjasama di tingkat lokal. Serta membangun komitmen kebijakan multi-stakeholder dalam jangka panjang.



# Program

**7**



Tahun

**2012-  
2022**



Donor

**6**



Total Dana\*

**266,844**

*\*dalam USD*



# Lingkungan dan Perubahan Iklim



Proses pembangunan yang serampangan akan mengganggu siklus karbon yang akan berdampak pada kelestarian lingkungan dan daya dukung bagi kehidupan manusia dan alam semesta.



Mendorong penguatan CSO dengan pendidikan publik untuk menggalang massa kritis bagi pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, efisiensi energi dan sumber daya alam, serta mencegah hilangnya keanekaragaman hayati.



# Program

**20**



Tahun

**2014-  
2022**



Donor

**17**



Total Dana\*

**8,468,379**

*\*dalam USD*



# Pemberdayaan Desa



Gagasan pembangunan inklusif akan mengurangi kemiskinan melalui kontribusi antara publik/pemerintah, masyarakat sipil, serta sektor swasta.



Memperkuat proses pengambilan keputusan dalam pembangunan partisipatif dengan menghormati nilai dan prinsip hak asasi manusia; dengan juga menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas



# Program

**13**



Tahun

**2015-  
2022**



Donor

**10**



Total Dana\*

**725,098**

*\*dalam USD*



# Kesehatan Masyarakat



Peningkatan pelayanan kesehatan dan sistem penganggaran kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.



Mendorong terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran dari tingkat kabupaten hingga nasional melalui partisipasi organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat



# Program

**19**



Tahun

**2011-  
2021**



Donor

**8**



Total Dana\*

**50,321,377**

*\*dalam USD*



# Akuntabilitas Publik



Akuntabilitas publik adalah hak warga negara untuk memperoleh informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan publik dan mendorong pemerintah untuk lebih akuntabel melalui partisipasi sosial, tanggung jawab sosial, dukungan sosial dan kontrol sosial.



Melakukan kajian, penelitian dan fasilitasi proses perencanaan dan pembangunan kebijakan daerah melalui dialog antara pemerintah dan warga dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi



# Program

**4**



Tahun

**2009-  
2016**



Donor

**2**



Total Dana\*

**657,228**

*\*dalam USD*



# Penguatan Ruang Sipil



Kedudukan dan peran masyarakat sipil sebagai aktor penyeimbang dalam pembangunan untuk memperkuat demokrasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan dasar yang berkeadilan.



Melaksanakan kegiatan capacity building melalui pelatihan, seminar, coaching dan mentoring; serta pengembangan platform pembelajaran dan juga mendorong mobilisasi sumber daya dalam negeri, penggalangan dana dan advokasi ketersediaan dana bagi masyarakat sipil melalui anggaran pemerintah



# Program

**57**



Tahun

**2011-  
2022**



Donor

**34**



Total Dana\*

**4,731,333**

*\*dalam USD*



# Transformasi Digital yang Berkeadilan



Transformasi digital merupakan kondisi yang memungkinkan menjangkau masyarakat yang lebih luas dan masif dalam proses pembangunan, advokasi dan pembelaan HAM melalui ranah digital. Namun, diperlukan kemampuan adaptasi masyarakat sipil dalam pendekatan kerjanya dan ketangguhan dalam menghadapi disrupsi informasi



Menyelenggarakan peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam adaptasi digital, kampanye digital dan mempromosikan digitalisasi, pendampingan bagi CSO untuk meningkatkan visibilitas organisasi, serta mengembangkan platform dan mengembangkan pedoman teknis.



# Program

**6**



Tahun

**2015-  
2021**



Donor

**5**



Total Dana\*

**34,588**

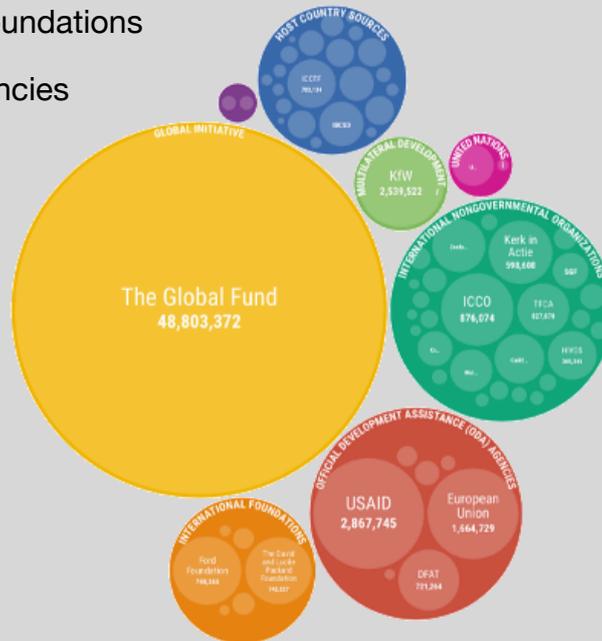
*\*dalam USD*

# Sumber Daya\*

48,803,372.51	Global Initiative
5,612,857.41	International NGO
5,492,865.77	Official Development Assistance (ODA) Agencies
2,539,522.10	Multilateral Development Bank
2,063,430.93	Host Country Sources
1,691,126.86	International Foundations
231,652.59	United Nation Agencies
45,322.37	Global Corporations

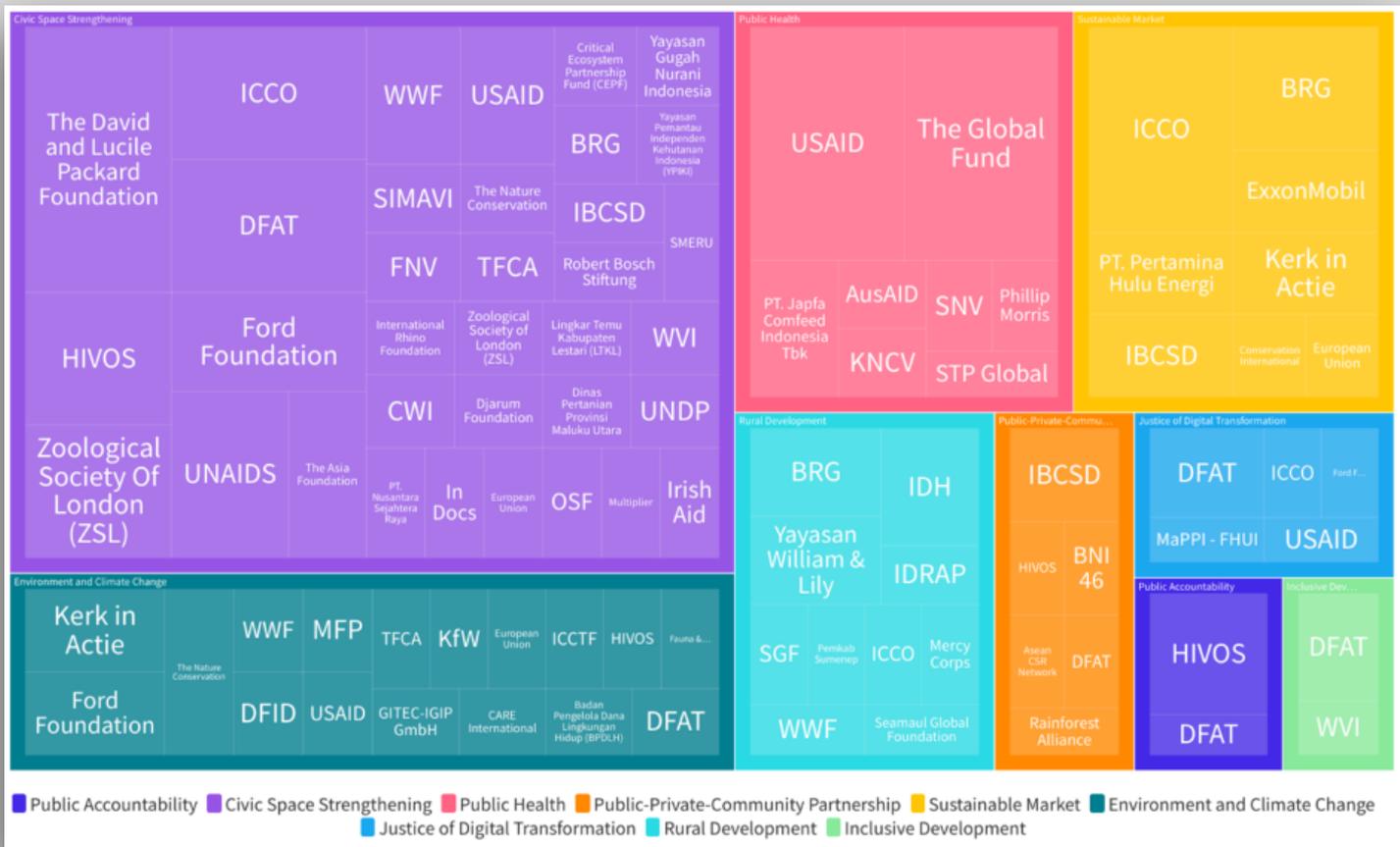
**Total**  
**66,480,151\***

\*dalam USD



■ International Nongovernmental Organizations 
 ■ Official Development Assistance (ODA) Agencies 
 ■ Host Country Sources 
 ■ Global Initiative 
 ■ Global Corporations 
 ■ Multilateral Development Banks 
 ■ International Foundations 
 ■ United Nations Agencies

# Sumber Daya sesuai Area Tematik



# 2021



# Program

**14\***



Donor

**14**



Total Dana\*\*

**49,928,660**



Penerima  
Manfaat

Orang: **431.423**

OMS/Komunitas: **109**

\*kesepakatan tahun 2021  
\*\*dalam USD



Nama Program	Lokasi
Community PR for TB Elimination in Indonesia 2021-2023	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Riau Island, DKI Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, Banten, Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, North Kalimantan, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Sulawesi, Papua, West Papua
Financial Management System Development	Indonesia
Indonesian Civil Society Resource Center Platform Development ( <a href="http://civica.id">civica.id</a> )	Banten, Central Java, Riau, West Kalimantan, East Java, North Sumatera, Yogyakarta, West Sumatera
Institutional Capacity Building for Implementing Partners in 26 Priority Districts - Part 2	North Sumatera, West Sumatera, Riau Island, Banten, DKI Jakarta, West Java, Yogyakarta, Central Java, East Java, Bali, South Sulawesi, North Sulawesi
GOSORA : Swakelola Tipe III	North Maluku
Implementation of Tuberculosis Revised District Public Private Mix (DPPM) Strategy in Medan and Denpasar	Bali, North Sumatera
Resource Hub for Strengthening Capacity on Financial Resiliency “Re.Search”	DKI Jakarta, West Sumatera, Central Java, DIY
Urban-Context Donor Landscape Analysis	DKI Jakarta, East Java
Amplifying Voice for Just Climate Action in East Nusa Tenggara (NTT)	East Nusa Tenggara
Covid-19 Response Project: DELTA SPIKE SUPPORT	DKI Jakarta, Bali
The Inovation and Knowledge Hub (MADANI iHub) – Phase II	DKI Jakarta
The Development of Draft Concept Note/ Proposal for funding the Green Development Agreement initiative model in East Kalimantan	East Kalimantan
Facilitate the Preparation of Rainforest Trust Project Work Plan Documents in Five Fauna and Flora Work Landscapes International Indonesia Program	DKI Jakarta
Lesson Learned Workshop and ECA Training	DKI Jakarta

# 2022



# Program

**13\***



Donor

**13**



Total Dana\*\*

**1,412,182**



Penerima  
Manfaat

Orang: **444**

OMS/Komunitas: **51**

*\*kesepakatan tahun 2022*

*\*\*dalam USD*



Nama Program	Lokasi
Preliminary Survey of Saemaul Pilot in 6 Villages at Kapanewon Nanggulan, Kulon Progo Regency, Special Region of Yogyakarta	DIY
Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure (GESIT)	East Java
Civil Society Network Resilience Workshop for Civic Space: The Bali Experience	Bali
COVID-19 Funds for Indonesian Partners	Indonesia
Lembaga Perantara Penyaluran Dana REDD+ (LEMTARA)	DKI Jakarta
Increasing the role of youth in disaster risk reduction at Central Sulawesi	Central Sulawesi
Partner Institutional Capacity Building	DKI Jakarta
INKLUSI Short Terms Consultant, Technical Assistance on Grant Management Supporting	DIY, South Sulawesi
Improving Program Acceleration and Capacity for CSOs Towards More Access to HIV Testing and Treatment (impact+)	-
LandScale Baseline Report, LandScale Action Plan Draft and Multistakeholder Forum Framework, Sintang District 2022	West Kalimantan
Penabulu Organizational Effectiveness Supported By Packard Foundation	DKI Jakarta
Strengthening the Effective power of Youth Women and Groups Other Vulnerable in Sustainable Natural Resource Management in Indonesia	South Sumatera, Central Java, East Nusa Tenggara
Development of Village Good Practice Management Guidelines (SWAKELOLA TIPE III)	DKI Jakarta





# Petikan Cerita dari Tapak

*Pesisir Balantak, Banggai, Sulawesi Tengah  
Doc.Pribadi: Andi Faisal Alwi - Burung Indonesia  
Mitra Yayasan Penabulu*



*Pengambilan data dummy pala  
Ternate  
Doc.Program: Nurul Purnamasari*



# Menjaga Kekayaan Rempah Nusantara

Rempah – rempah merupakan komoditas asli Indonesia yang tumbuh subur di hampir seluruh kepulauan nusantara. Semenjak kedatangan Portugis mendarat di Maluku, Indonesia pada tahun 1512, rempah asli Indonesia telah dikenal di seluruh dunia dan menjadi titik poin jalur perdagangan di bumi nusantara hingga saat ini. Komoditas Lada (*Piper nigrum*), Pala (*Myristica fragrans*), dan kayu manis (*Cinnamomum burmannii*) merupakan tiga jenis rempah dengan permintaan tinggi di Eropa dan hampir diseluruh dunia. Kepopuleran tersebut menjadikan rempah Indonesia sebagai andalan sumber penghidupan bagi masyarakat di wilayah dimana rempah tumbuh subur.

Sebagian besar petani rempah Indonesia merupakan petani kecil dengan pendapatan yang rendah. Panjangnya rantai nilai rempah menjadi salah satu penyebab utama rendahnya pendapatan di tingkat petani rempah. Bagi petani rempah, harga murah merupakan kenyataan pahit yang dapat menyebabkan

mereka menjual tanah mereka, atau mengganti menanam komoditas lain, bahkan beralih pekerjaan, dan berhenti menjadi petani untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perdagangan rempah ekspor Indonesia mulai mengalami gejolak setelah ditemukannya kontaminasi jamur dan bahan kimia di beberapa distribusi komoditas rempah yang di ekspor ke Amerika maupun Eropa. Temuan tersebut merupakan penurunan kualitas dalam rantai distribusi yang mempengaruhi harga jual rempah. Berdasarkan riset di tingkat tapak yang kami lakukan, penurunan kualitas terjadi karena pemahaman petani rempah atas standar budidaya dan penanganan mutu rempah yang masih rendah. Jika tidak diatasi, permasalahan ini akan berdampak pada pendapatan hingga kehidupan jangka panjang petani rempah.

Berangkat dari keresahan tersebut, Yayasan Penabulu Bersama ICCO Cooperation Melalui Civic Engagement Alliance (CEA) memperbaiki kualitas rempah melalui penyesuaian produk rempah ekspor dengan standar mutu yang ditetapkan oleh pasar global atau negara tujuan.

Kami mengembangkan produk inovasi sebagai hasil lobi dan advokasi multi-pihak yang memiliki kepentingan memperbaiki perdagangan rempah di Indonesia, berupa platform digital yang diberi nama DATA KOMODITAS TERPADU (DAKOTA). DAKOTA mendorong petani untuk mencapai kualitas produk rempah berbasis standar tertentu yang berlaku di pasar internasional. Fitur sistem kontrol internal dan ketertelusuran berbasis digital efektif memvisualisasikan tahapan rantai nilai menjadi lebih transparan. Hal ini dapat menjamin kualitas produk rempah dari kebun hingga ke konsumen.

Sistem DAKOTA mengedepankan prinsip bisnis inklusif, pengembangan kelembagaan petani, transparansi, serta menekankan prinsip bisnis yang bertanggung jawab. Melalui sertifikasi mandiri, platform DAKOTA telah membantu petani memiliki identitas ekonomi dan rekam jejak yang dapat meningkatkan akses pasar petani, mengurangi risiko penipuan dengan membuat jejak distribusi produk rempah lebih dapat diandalkan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memiliki daya tawar pasar.

Petani rempah mayoritas berada di kawasan dengan jaringan internet yang terbatas. Pengetahuan petani akan teknologi juga sangat rendah. Hal ini merupakan tantangan bagi kami dalam pengembangan platform DAKOTA. Pendekatan yang kami lakukan terkait

mekanisme alur data, dengan melibatkan penguatan kelembagaan kelompok dan kapasitas petani melalui sistem pengendalian internal (ICS) kelompok. Kini dibawah rindangnya pohon pala, petani pala telah mampu meyakinkan kepada calon pembeli terkait kualitas rempahnya yang sesuai dengan standar kualitas pasar global melalui platform DAKOTA tanpa harus bertemu.

Sebagai inovasi digital yang berdampak ekonomi dan sosial, DAKOTA berhasil menjadi salah satu dari *The 30 Most Inspiring Digital Innovations of 2020* yang disematkan oleh The Spindle-Partoz. The Spindle merupakan forum inovator digital yang diprakarsai oleh Partos, sebuah NGO pembangunan internasional asal Belanda. Capaian dan dampak dari DAKOTA diharapkan menjadi awal mula Penabulu Foundation berkontribusi dalam upaya menjaga kekayaan rempah Nusantara. (YS)



# Merajut Makna di Jantung Wallacea

Tahun 2019 merupakan fase akhir Yayasan Penabulu menjadi bagian dari Program Kemitraan Konservasi Wallacea yang didukung oleh Critical Ecosystem Partnership Fund.

Di tahun terakhir ini interaksi kami dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang menjadi mitra program terjadi dalam beberapa kegiatan yakni; **Fasilitasi Forum Mitra Kemitraan Konservasi Wallacea fase ke-2**, yang bekerja di **6 Priority Fund Area (PFA)**. Dalam kegiatan di fase ini, tidak hanya OMS mitra saja yang terlibat dalam kegiatan namun juga pemangku kepentingan di masing-masing PFA, dengan harapan melalui kegiatan ini dapat terbangun kesamaan perspektif bersama yang dapat mendorong aksi-aksi kolaboratif lebih lanjut di wilayah tapak yang akan memastikan keberlanjutan aksi konservasi di Wallacea meski Program Kemitraan Konservasi Wallacea telah selesai.

Selain fasilitasi forum mitra, kegiatan lain yang dilakukan di tahun akhir program ini adalah penyelenggaraan **Seri Pelatihan Manajemen Program** dengan mengusung tema **“Mengelola**

**Perubahan dan Mendorong Pertumbuhan Organisasi”**. Topik utama yang diusung dalam pelatihan yang diselenggarakan di Denpasar dan Makassar ini adalah; Tata Kelola Institusional, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Data-Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengelolaan Pengetahuan, serta Kampanye Publik dan Komunikasi (Advokasi Kebijakan Publik). Hasil utama dari kegiatan ini adalah **Modul Pelatihan Manajemen Program; Mengelola Perubahan dan Mendorong Pertumbuhan Organisasi**.

Di tahun ini pula, Yayasan Penabulu berhasil menyelesaikan kajian tentang potensi pendanaan program konservasi di Wallacea yang tertuang dalam **Merajut Pelembagaan Pendanaan Konservasi untuk Wallacea**, dengan rekomendasi perlunya **Membangun Perencanaan Kolaboratif dalam roadmap pengelolaan landscape/seascape yang terintegrasi** di Wallacea sebagai salah satu bentuk memastikan terus berjalannya kerja-kerja konservasi di laboratorium hidup keragaman hayati Indonesia ini.

A diver in a blue tank and mask is exploring a coral reef underwater. The diver is positioned in the center of the frame, looking towards the camera. The background is a clear blue ocean with sunlight filtering through the water. The coral reef is visible in the foreground and middle ground, with various types of coral and rocks.

Selama tiga tahun Penabulu mendampingi OMS Mitra Program Kemitraan Konservasi Wallacea, kami mendapati beragam kejutan pertumbuhan dari para organisasi mitra. Berawal dari perubahan orientasi nilai organisasi, beberapa organisasi mitra pada akhirnya memiliki kebiasaan baru dalam melihat dan menanggapi isu-isu konservasi serta keragaman hayati di Wallacea.

Lompatan terbesar para organisasi mitra nampak pada saat mereka mempresentasikan hasil-hasil capaian organisasi dalam kegiatan penutupan Program Kemitraan Konservasi Wallacea. Tampak betul bahwa para OMS mitra benar-benar mengasah keterampilan mereka untuk mengeksplorasi pengetahuan konservasi yang mereka miliki, mengkombinasikannya dengan elemen-elemen lain di masyarakat seperti; komunitas dan kebudayaan lokal setempat, sehingga menghasilkan inisiatif aksi konservasi yang efektif di tataran spesies, tapak, pun di masyarakat serta pada saat yang sama mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah sasaran program.

Di sisi yang lain, pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam lanskap dan ekosistem lanskap adalah strategi yang efektif dalam memfasilitasi OMS untuk pembangunan kapasitas. Dimana akhir dari keterlibatan berbagai pemangku kepentingan adalah penciptaan bersama, desain bersama, dan aksi bersama untuk pengelolaan kawasan sebagai lanskap dan ekosistem lanskap dalam kerangka aksi konservasi yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, program ini semakin meneguhkan keyakinan kami; sebagai organisasi yang mengabdikan diri pada keberdayaan masyarakat sipil di Indonesia bahwa; Membangun kesetaraan, menciptakan suasana belajar yang nyaman, pendekatan hak asasi manusia dan penghargaan atas pengalaman adalah kunci untuk mengimplementasikan pengembangan kapasitas bagi OMS di Indonesia; garda terdepan penyelaras pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

*Monitoring Terumbu Karang di Perairan Peling Banggai,  
Desa Bone-bone, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah  
Doc.Pribadi: Moh Rizal Mutael - SIKAP Instute  
Mitra Yayasan Penabulu*



# Menabur Benih Kemitraan Komunitas -Sektor Swasta- Pemerintah

*“Saya baru sadar, kalau kita bisa melibatkan perusahaan yang beroperasi di sini untuk pembangunan pipa irigasi bagi sawah-sawah desa. Kenapa baru terpikir sekarang ya”*

Demikian yang diungkapkan oleh Bapak Yance, Kepala Desa Menapar saat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh program RESBOUND. Desa Menapar adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Nanga Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

Berada di perbukitan dataran tinggi yang telah pula dikelilingi kebun sawit. Pasokan air bersih menjadi permasalahan bagi desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh sawit ini dari waktu ke waktu.

Dalam cerita yang disampaikan, Pak Yance menyatakan, bahwa sebenarnya di Desa Menapar terdapat sumber air, Bukit Dodol namanya. Namun jarak antara bukit Dodol dengan pemukiman warga cukup jauh. Air harus dialirkan melalui pipa-pipa dari sumbernya menuju ke pemukiman warga. Dan dengan jarak yang sejauh itu, biaya yang dibutuhkan untuk instalasi pipa juga besar. Desa tak memilikinya.

Warga Desa Menapar yang menjadi buruh harian lepas bekerja untuk PT Kartika Prima Cipta (KPC) salah satu anak perusahaan PT Sinarmas Group.

Pada bulan Agustus 2020, Pak Yance dan beberapa kepala desa yang lain mengikuti pelatihan lobby dan advokasi di Desa Nanga Suhaid. Dalam pelatihan ini Pak Yance seolah tersadar, bahwa perusahaan yang beroperasi di desanya semestinya dapat dilibatkan untuk membangun jalur pipa dari Bukit Dodol menuju ke pemukiman warga.

Pasca pelatihan yang diikuti, Pak Yance memasukkan rencana pipanisasi Bukit Dodol ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tahun 2021, sumber anggaran untuk proyek itu direncanakan berasal dari dana CSR PT KPC. Pak Yance akan melobby PT KPC dengan mengundang pihak perusahaan di MusDes APBDES 2021. Harapan Pak Yance cukup besar, proyek pipanisasi ini tidak hanya akan membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warganya, namun juga berpotensi perbaikan ekonomi bagi desa.

Kisah Paak Yance itu hanya salah satu dari sekian kisah yang dialami oleh penerima manfaat program **Responsible and Sustainable Business in Indonesia Palm Oil Plantation (RESBOUND)**, sebuah program yang dikerjakan secara konsorsium antara Yayasan Penabulu, PKPA, dan ICCO Cooperation sebagai ketua konsorsium.

Menyasar masyarakat di dalam dan di sekitar perkebunan kelapa sawit, program yang didukung oleh European Commission ini 10 desa di Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat, dan 10 desa di tiga Kabupaten (Langkat; Serdang Bedagai; Deli Serdang) di Provinsi Sumatera Utara. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat dialog kemitraan multi-pemangku kepentingan yang tersedia untuk berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan pedesaan yang layak dari petani kecil dan pekerja di perkebunan kelapa sawit besar melalui perumusan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat dan Perusahaan (Community and Corporate Social Responsibility - CCSR), sebagai cara untuk menggunakan dana desa dan CSR perusahaan dengan lebih baik. Dan pada saat yang sama diharapkan skema CCSR juga akan berfungsi sebagai cara untuk menggunakan UNGP dengan lebih baik di sektor minyak kelapa sawit di tingkat akar rumput.

Dalam program ini, Penabulu bertanggung jawab untuk mengelola, mengawal, dan memastikan seluruh aktivitas program dapat berjalan dengan baik di Provinsi Kalimantan Barat.

Sepanjang 2020, kami telah melakukan kegiatan-kegiatan yang terdiri dari penyiapan lapangan, sosialisasi program, dan serangkaian peningkatan kapasitas bagi para

penerima manfaat. Selain itu, sebagai bagian untuk mendapatkan dukungan dari para pihak, telah pula dilakukan pertemuan secara daring dengan beberapa kementerian terkait.

Di tapak sendiri, juga telah dilakukan serangkaian pertemuan dengan perusahaan-perusahaan sawit yang menjalankan operasi bisnisnya di wilayah-wilayah sasaran program. Kami mulai mensosialisasikan skema CCSR kepada perusahaan-perusahaan ini. Di ujung program nanti, kami berharap dapat tercapai kesepakatan yang membangun antara desa dengan perusahaan.



*Panen perdana sawah yang didukung kerjasama  
desa dan CSR*

*Doc.program: Stephanus Mulyadi*



# Hidup Harmonis dalam Irama Alam

Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan alamnya. Kekayaan alam tersebut tidak hanya terbatas pada kekayaan keanekaragaman hayati yang menduduki tempat kedua setelah Brazil, namun juga kekayaan mineral di dalam perut bumi. Proses alam yang dimulai sejak jutaan tahun yang lalu dan masih berlangsung hingga saat inilah yang menghasilkan kekayaan alam kebanggaan Indonesia. Proses alam yang bagaikan kepingan uang logam dengan dua sisi yang berbeda.

Kita sebut saja salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Sulawesi Tengah. Provinsi ini merupakan penghasil logam nikel terbesar di Indonesia, dan memiliki keanekaragaman hayati yang telah diakui dunia internasional. Khusus untuk keanekaragaman hayati, di provinsi ini terletak Taman Nasional Lore Lindu yang sebagian kawasannya sejak tahun 1973 telah ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa dan pada tahun 1977 ditetapkan sebagai Cagar Biosfer oleh UNESCO, namun baru pada tahun 1993 ditetapkan sebagai taman nasional dengan luas 229.000 hektar. Masih segar dalam ingatan kita rangkaian bencana yang terjadi di provinsi ini, yang oleh para ahli diyakini sebagai akibat dari

proses alam yang tengah berlangsung. Gempa dan tsunami yang terjadi pada tahun 2018, menurut BMKG merupakan akibat dari aktifitas Sesar Palu Koro. Pasca peristiwa tersebut provinsi ini menjadi lebih waspada terhadap berbagai kejadian bencana. Lembaga yang khusus menangani bencana di daerah ini (Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ BPBD) menyebutkan bahwa bencana alam yang perlu diwaspadai adalah gempa, tsunami, likuifaksi, banjir, longsor, dan kekeringan.

Yayasan Penabulu sebagai organisasi masyarakat sipil telah terlibat dalam berbagai program terkait penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2018. Salah satunya adalah Program M-RED di Kabupaten Sigi yang merupakan program yang diimplementasikan oleh 3 lembaga yaitu Mercy Corps Indonesia, Karsa Institute dan Yayasan Penabulu. Dalam program ini, Penabulu mengelola kegiatan-kegiatan terkait dengan pengurangan risiko bencana (*Disaster Risk Reduction/ DRR*). Salah satu dari kegiatan DRR dalam Program M-RED adalah Pengelolaan Sumberdaya Alam (*Natural Resource Management/ NRM*).



Dalam menjalankan kegiatan M-RED ini, Penabulu bekerjasama dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang ada di 3 desa yang merupakan lokasi kegiatan NRM. Forum ini merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat desa. Anggota forum mendapatkan pelatihan dari instansi dan lembaga yang berkecimpung dalam bidang kebencanaan. Pada tahap awal Program M-RED, forum ini menyusun dokumen Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana di Tingkat Desa dengan didampingi oleh Tim Penabulu. Kegiatan NRM merupakan tindak lanjut dari rencana aksi tersebut.

Berdasarkan dokumen rencana aksi yang telah disusun dan dikuatkan dengan musyawarah desa, diputuskan kegiatan NRM untuk tiga desa yang dinilai berpotensi untuk mengembangkan kegiatan ini. Kegiatan tersebut adalah 1) pembuatan demplot agroforestry di sempadan sungai di Desa Pulu, 2) pembuatan demplot agroforestry di lahan miring di Desa Toro dan 3) penanaman tanaman penguat tebing di sempadan sungai di Desa Mataue. Pemilihan lokasi dan jenis tanaman yang akan ditanam dilakukan secara partisipatif dan melibatkan perwakilan masyarakat dan pemerintah di masing-masing desa.

Dalam menjalankan kegiatan ini, Tim Penabulu sebisa mungkin melakukan *engagement* terhadap parapihak yang berkepentingan terhadap pengurangan risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sigi. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin keberlanjutan dari kegiatan yang telah dilakukan dan memastikan manfaat kegiatan ini dapat dirasakan oleh masyarakat sasaran. Para pihak tersebut terdiri dari instansi pusat (KLHK) yang berkantor di Palu, UPT Dinas Kehutanan Provinsi (KPH Kulawi), serta Bappeda dan dinas terkait di Kabupaten Sigi. Disamping itu dilibatkan pula akademisi, CSO dan pihak swasta yang berpeluang mendukung kegiatan ini. (AED)



# Memulihkan Kehidupan di Tanah Gambut

Kawasan hidrologi gambut merupakan sebuah kawasan penyimpan karbon terbanyak dan memiliki ekosistem yang unik. Di Indonesia sendiri, kawasan gambut diperkirakan seluas 14,9 juta hektar<sup>[1]</sup>. 43% berada di Pulau Sumatera, 32% di Pulau Kalimantan, dan 25% terdapat di Papua. Namun sayangnya, ketidaktepatan pengelolaan lahan gambut seperti pembakaran lahan dan pengeringan, mengakibatkan kawasan penyimpan karbon terbesar ini mengalami kerusakan yang cukup parah.

Di tahun 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016, Pemerintah Republik Indonesia membentuk sebuah lembaga non struktural bernama **Badan Restorasi Gambut (BRG)** sebagai upaya percepatan pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut. Dalam mengemban amanat ini, BRG bekerja dengan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil baik di lokal wilayah target restorasi gambut, pun dengan organisasi di level nasional dan internasional.

Sejak tahun 2016, beragam aktivitas telah dilakukan oleh Yayasan Penabulu untuk

mendukung upaya restorasi gambut melalui penguatan masyarakat desa dampingan BRG dalam Program Desa Peduli Gambut (DPG), dengan fokus pada revitalisasi sosial ekonomi masyarakat. Dalam karya-karya ini, Penabulu erat menjalin komunikasi dengan Kedeputusan III BRG -Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan-

April tahun 2018, Penabulu mengorganisir Jambore Masyarakat Gambut 2018 di Kiram Park, Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan lebih dari 1500 orang petani dari tujuh provinsi prioritas restorasi gambut, untuk saling membagikan pengalaman, cerita-cerita sukses mengolah lahan gambut yang berkelanjutan, serta memperkenalkan kebudayaan lokal setempat yang nampak dari kesenian hingga makanan khas dari wilayah masing-masing.

November 2018, Penabulu kembali memfasilitasi 70 Desa Peduli Gambut dari 6 Provinsi target restorasi gambut, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dalam pelatihan Pengembangan BUMDesa dengan dukungan dari KEMITRAAN.



Selain melatih Melalui proyek ini, Penabulu berhasil menyempurnakan seri modul penguatan kapasitas BUMDesa yakni; (1) Modul Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa, (2) Modul Pemetaan dan Perencanaan Usaha BUMDesa, dan (3) Modul Pengelolaan Keuangan Usaha BUMDesa.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah penghasil purun –tumbuhan sejenis rumput yang tumbuh liar dan endemik di lahan gambut – Oleh masyarakat setempat, purun dimanfaatkan sebagai bahan baku utama untuk membuat beragam kerajinan anyaman seperti tikar, dompet dan tas, yang dipasarkan secara lokal.

Melihat potensi lebih lanjut dari purun, tepat di akhir tahun, bekerja sama dengan Paguyuban Pengusaha Kerajinan Bina Karya Lestari, Kulon Progo Yogyakarta. Dengan dukungan dari BRG-RI, Penabulu memfasilitasi kegiatan Pelatihan Kerajinan Serat Alam Tingkat Mahir bagi para pengrajin anyaman purun dan rotan dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

18 pengrajin purun dari 3 kabupaten tersebut mengikuti pelatihan selama 1 bulan penuh di Bina Karya Lestari untuk mengolah purun yang merupakan serat alam endemik gambut menjadi beragam kerajinan yang lebih menarik sehingga dapat meningkatkan nilai jual purun sehingga dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

*Kerajinan dari serat Purun  
Doc.Proogram: Dwi Premadha*

# Badan Pelaksana



**PENABULU MANAJEMEN HIBAH (*Penabulu Grant Management*)** adalah salah satu dari empat Badan Eksekutif di bawah Yayasan Penabulu yang menjalankan fungsi penggalangan sumber dana, penyaluran dan pengelolaan dana hibah, serta memfasilitasi advokasi kebijakan publik secara berjejaring.

Disahkan secara resmi pada pada 24 Oktober 2018 berdasarkan akta notaris No. 31 oleh Kokoh Henry, SH, MKn, notaris di Jakarta. Penabulu Manajemen Hibah juga mengemban amanat untuk memberikan pelatihan, asistensi teknis dan peningkatan kapasitas organisasi kepada mitra untuk mendukung skema hibah lain.



**PENABULU JEJARING IMPLEMENTASI (*Penabulu Implementing Network*)** adalah salah satu dari empat Badan Eksekutif di bawah Yayasan Penabulu yang dimandatkan untuk melanjutkan cikal bakal peran Penabulu sebelumnya dalam mengimplementasikan program pada tingkat tapak dengan memaksimalkan kontribusi dari kantor cabang dan bekerja sama dengan jejaring mitra aliansi; dengan tetap

menekankan pada kepemilikan dan penguatan kapasitas lokal pada setiap wilayah kerja.

Secara resmi disahkan pada 24 Oktober 2018 berdasarkan akta notaris No. 30 oleh Kokoh Henry, SH, MKn, notaris di Jakarta, hingga saat ini Penabulu Jejaring Implementasi telah bermitra dengan ratusan OMS di seluruh Indonesia.



**PENABULU INSTITUT RISET** (*Penabulu Research Institute*) adalah salah satu dari empat Badan Eksekutif di bawah Yayasan Penabulu yang secara resmi disahkan pada 24 Oktober 2018 berdasarkan akta notaris No. 30 oleh Kokoh Henry, SH, MKn, notaris di Jakarta.

Dimandatkan untuk mengelola data, informasi dan pengetahuan yang

dilahirkan dan dikelola oleh Penabulu. Badan pelaksana ini bergerak dengan mengembangkan Kajian strategis, riset aksi dan advokasi berbasis data yang mendukung pencapaian tujuan organisasi; yang pada saat yang sama menjadi ujung tombak bagi pengembangan kemitraan yang efektif dengan lembaga penelitian/universitas dan pemerintah pusat maupun daerah.



**PENABULU TANGGAP BENCANA** (*Penabulu Disaster Response*) merupakan Badan Eksekutif termuda Yayasan Penabulu. Dibentuk dengan mandat menyatukan sumber daya organisasi dalam tanggap bencana di Indonesia, Badan Pelaksana yang dikukuhkan secara resmi pada 12 November 2019 berdasarkan akta notaris No. 11 oleh Kokoh Henry, SH, MKn ini bertugas untuk menggalang sumber daya para pihak, menyalurkan bantuan logistik

kemanusiaan dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan darurat dan pemulihan mata pencaharian masyarakat terdampak sesegera mungkin sesuai dengan sistem pasar lokal.

